

# RENCANA KERJA

# RENJA 2025



**KECAMATAN PEKALONGAN UTARA**  
**KOTA PEKALONGAN**

**Jalan Kusuma Bangsa No.96 Kota Pekalongan**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, alhamdulillah dengan rahmatNya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 telah berhasil disusun. Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekalongan Utara 2021-2026, dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Renja ini, secara rinci telah ditetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan pada tahun 2025. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta pagu anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Diharapkan Renja ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Kecamatan Pekalongan Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pekalongan dapat tercapai dengan optimal terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pekalongan, 05 Agustus 2024  
CAMAT PEKALONGAN UTARA  
KOTA PEKALONGAN  
**WISMO ADITYO S, Pt, MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197100261999031006

KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	38
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	40
3.3 Program dan Kegiatan.....	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	55
4.1 Rencana Kerja.....	55
4.2 Pendanaan.....	57
BAB V PENUTUP.....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29.....	12
Tabel T-C.30.....	19
Tabel T-C.31.....	25
Tabel T-C. 32.....	35
Tabel T-C.33.....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan Renja dengan Dokumen perencanaan dan Penganggaran.....	3
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pekalongan Utara.....	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk Tahun 2025. Renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pekalongan Utara tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Hal ini dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung samapai dengan seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penyusunan Renja PD yang dilakukan melalui tiga tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup sebagai berikut :

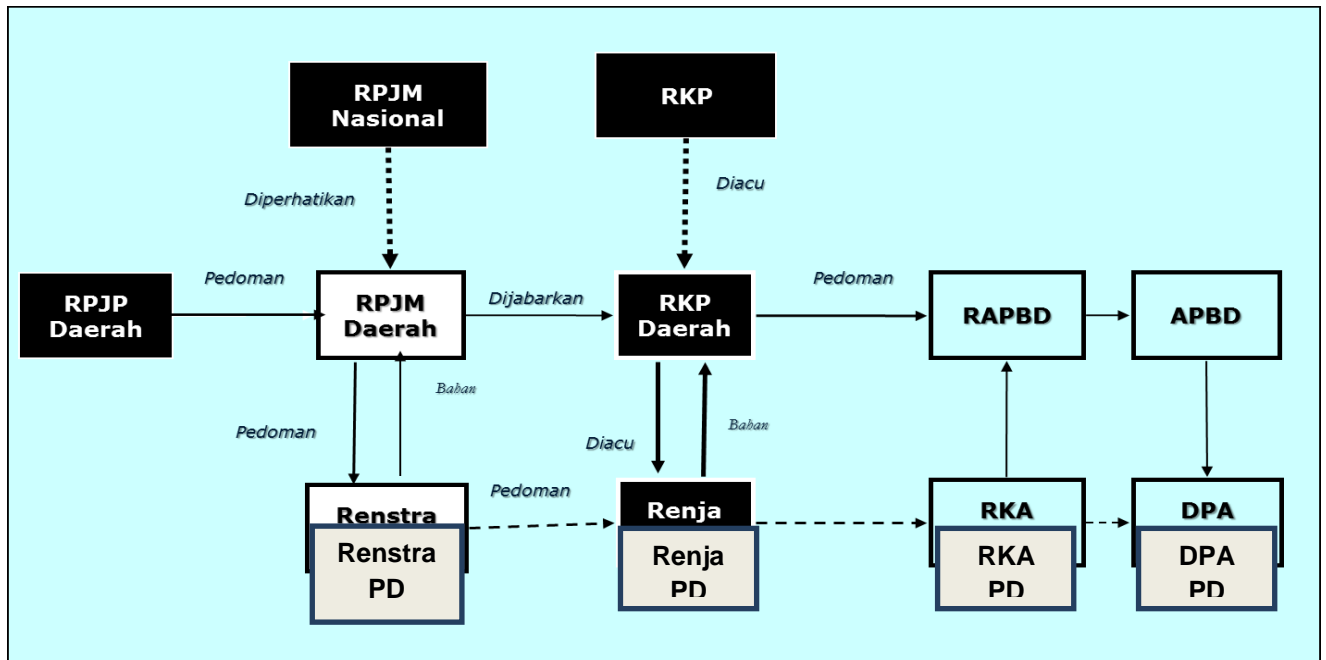
1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD.

2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.
3. Tahap penetapan Renja OPD.

Renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan penentuan pagu dalam Renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 mengacu kepada rencana program prioritas pada Rancangan Akhir RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rancangan Akhir RKPD yang disusun ke dalam Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, selaras dengan Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2021-2026. Selanjutnya Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025 dijadikan sebagai dasar penyusunan Penetapan Renja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025 yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Akhir Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

**Gambar 1**

**Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**



Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (diolah)

**1.2. Landasan Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
  6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan Dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peratauran Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19) ;
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
17. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2021-2026.

18. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

**1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas wilayah yaitu perencanaan strategis di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan guna mewujudkan keadaan dalam waktu satu tahun kedepan yang mendukung visi misi Kepala Daerah, yang diutamakan guna kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

Kemudian tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan/arah bagi Kecamatan Pekalongan Utara dalam menyusun program/kegiatan prioritas tahun 2025 berdasarkan ketersediaan sumberdaya yang ada;
2. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Kasi/Kasubag di lingkungan Kecamatan Pekalongan Utara dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025.
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah.

**1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

I.I Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

## I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

## I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

### II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;

### II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,

memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

- II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;
- II.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD berisikan tentang proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, diuraikan kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

**BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi **beberapa** pembagian pembahasan, yaitu :

- III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah , pada bagian ini, perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

III.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan

**BAB IV PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN**  
**RENCANA KERJA TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2023 dan Capaian Kecamatan Pekalongan Utara pada Tahun Anggaran berjalan 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Pekalongan Utara berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun 2023) dan tahun berjalan 2024 Kecamatan Pekalongan Utara dapat disajikan dalam table T-C.29 sebagai berikut:

**TABEL T-C.29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT**  
**DAERAH s/d TAHUN BERJALAN**  
**KECAMATAN PEKALONGAN UTARA**  
**TAHUN : 2024**

1	2	3	4	5	6	7		8	9
						10	11		
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Status Capaian	
7.01.0.00.0. 00.01.00	Kecamatan Pekalongan Utara								
7.01	Urusan Kewilayahan								
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja - Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - Presentase pengadaan/pemel iharaan barang milik daerah	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
					100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
					100 %	96,67%	96,67 %	96,67 %	Tidak tercapai Jadwal pekerjaan di alihkan
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, panganggaran, dan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai



		evaluasi kinerja perangkat daerah							
<b>7.01.01.2.02</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
<b>7.01.01.2.05</b>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
<b>7.01.01.2.06</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
<b>7.01.01.2.08</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
<b>7.01.01.2.09</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
<b>7.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di wilayah Utara	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai

<b>7.01.03</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
<b>7.01.04</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara</b>	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
<b>7.01.05</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasaan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasaan Kepala Daerah	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai

7.01.0.00.0.0 0.01.0001	Kelurahan Kandang Panjang								
<b>7.01.03</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.0.00.0.0 0.01.0002	Kelurahan Panjang Wetan								
<b>7.01.03</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.0.00.0.0 0.01.0003	Kelurahan Degayu								
<b>7.01.03</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.0.00.0.0 0.01.0004	Kelurahan Bandengan								
<b>7.01.03</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan</b>	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai

		<b>Kelurahan</b>							
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.0.00.0.0 0.01.0005	Kelurahan Krapyak								
<b>7.01.03</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.0.00.0.0 0.01.0006	Kelurahan Padukuhan Kraton								
<b>7.01.03</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7.01.0.00.0.0 0.01.0007	Kelurahan Panjang Baru								
<b>7.01.03</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Persentase	100 %	100 %	100 %	93,3 %	100 %	Tercapai
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Ketercapaian pemberdayaan	Persentase	100 %	100 %	100 %	93,3 %	93,3 %	Tidak Tercapai karena ada pengalihan jadwal

		kelurahan							pekerjaan pada tahun berikutnya
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisikan tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pekalongan Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Kemudian untuk jenis indikator kajian disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing Kecamatan Pekalongan Utara serta ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Berikut data tabel kinerja pelayanan Kecamatan Pekalongan Utara :

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM KECAMATAN PEKALONGAN UTARA ( YANG DIAMPU OLEH CAMAT )

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja 2. Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian 3. Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %

2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 %	100 %
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan di Kelurahan Wilayah Utara	100 %	100 %
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 %	100 %
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di wilayah Utara	100 %	100 %

Hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pekalongan Utara, sebagaimana terlampir.

**TABEL T-C.30  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA**

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI			CATATAN ANALISIS
				Tahun 2022 (Thn. n-2)	Tahun 2023 (Thn. n-1)	Tahun 2024 (Thn. n)	Tahun 2025 (Thn. N+1)	Tahun 2022 (Thn. n-2)	Tahun 2023 (Thn. n-1)	Tahun 2024 (Thn. n)	Tahun 2025 (Thn. N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nilai SAKIP OPD			75,5	77	78,5	80	73,65	74,73	78.5	80	
2.	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	41.12	100%	Capain pada tahun 2024 adalah capaian sampai dengan TW II
3.	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	30.16	100%	Capain pada tahun 2024 adalah capaian

	Pemerintahan Daerah											sampai dengan TW II
4.	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100 %	96,67 %	23.58	100%	Capain pada tahun 2024 adalah capaian sampai dengan TW II
5	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara			100%	100%	100%	100%	100%	100%	58.34	100%	Capain pada tahun 2024 adalah capaian sampai dengan TW II
6.	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara			100%	100%	100%	100%	100%	100%	50 %	100%	Capain pada tahun 2024 adalah capaian sampai dengan TW II
7.	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Utara			100%	100%	100%	100%	100%	100%	50 %	100%	Capain pada tahun 2024 adalah capaian sampai



												dengan TW II
8.	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	Capain pada tahun 2024 adalah capaian sampai dengan TW II

### **2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Kecamatan Pekalongan Utara sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabarkan dari akar masalah di tingkat kota. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kecamatan Pekalongan Utara sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tersaji dalam 2 urusan yang diampu yaitu sebagai berikut :

a. Urusan Kewilayahan

Permasalahan yang ada yaitu :

1. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Trantibum
3. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan
4. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum
5. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
6. Belum optimalnya kualitas pengawasan Perangkat Daerah

b. Non Urusan

Permasalahan yang ada yaitu :

1. Belum optimalnya ketersediaan laporan capaian kinerja
2. Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
3. Belum optimalnya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah
4. Belum optimalnya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
5. Belum optimalnya ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah
6. Belum optimalnya ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Belum optimalnya ketercapaian administrasi umum perangkat daerah

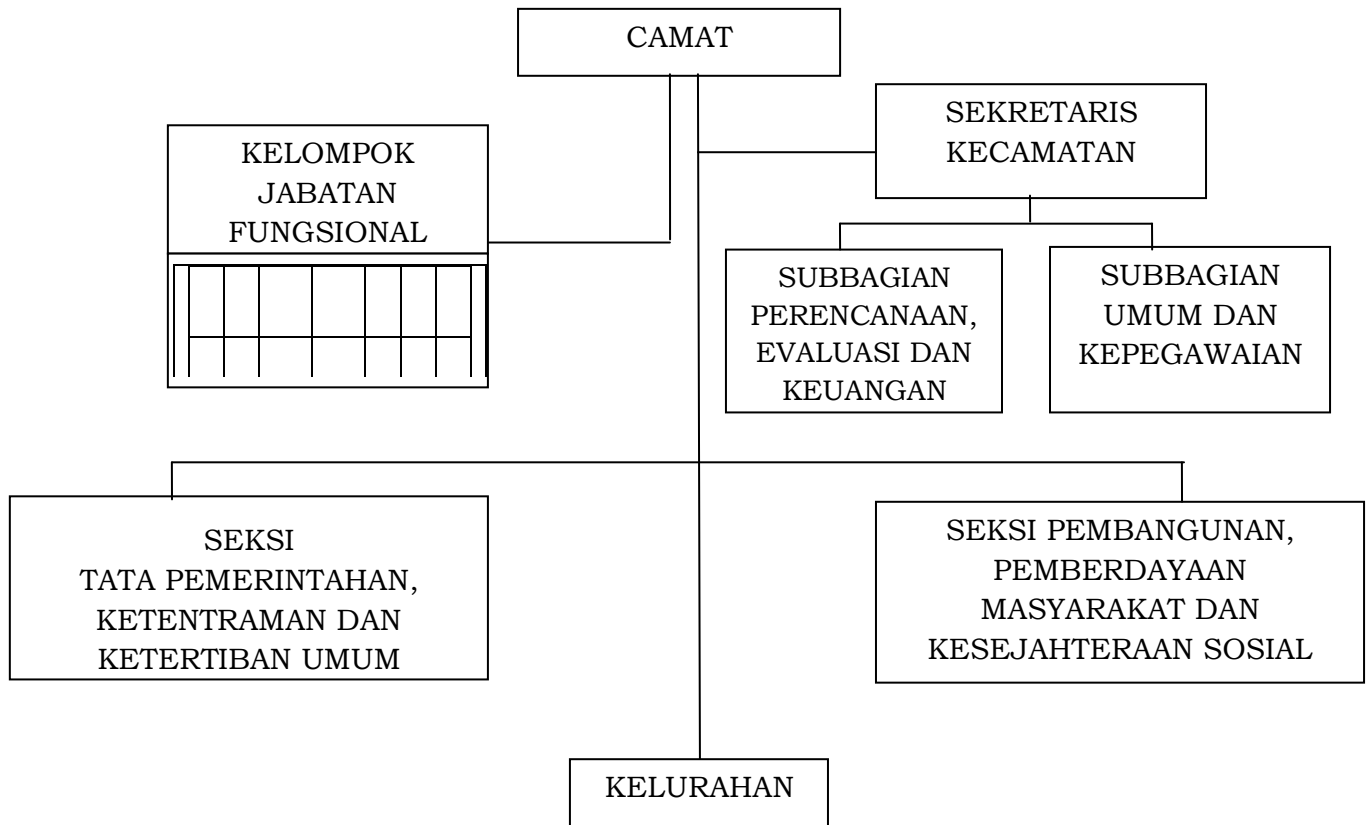
Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam

RT/RW di Kota Pekalongan yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara, sebagai berikut :

- a. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, cepat, tepat, efisien, dan transparan.
- b. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan akuntabilitas.
- c. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- d. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- e. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Pekalongan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Pekalongan Utara dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dan perbaikan terhadap kondisi geografis yang sampai dengan ini terjadi untuk kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA**



## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2025, maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.31

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025  
Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

### OPD. KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -Penyusunan	Kecamatan Pekalongan Utara	-Jumlah dokumen	3 dokumen	7.668.000	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -Penyusunan	Kecamatan Pekalongan Utara	-Jumlah			

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	perencanaan perangkat daerah				Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	4.089.000	
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2 dokumen	1.886.000		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		- Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2 dokumen	1.927.000	
-Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 laporan	195.900.000		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 laporan	108.570.000	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	62 orang	7.590.684.000		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	71 orang	7.576.059.000	
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	195.900.000		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD		- Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	195.900.000	
- Koordinasi	- Jumlah	1 laporan	1.748.000		-		- Jumlah			

dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD <b>Administrasi</b> <b>Kepegawaian</b> <b>Perangkat</b> <b>Daerah</b>		laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir SKPD				- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD <b>Administrasi</b> <b>Kepegawaian</b> <b>Perangkat</b> <b>Daerah</b>		laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir SKPD	1 laporan	1.786.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya <b>Administrasi</b> <b>Umum</b> <b>Perangkat</b> <b>Daerah</b>		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 paket	16.500.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya <b>Administrasi</b> <b>Umum Perangkat</b> <b>Daerah</b>		-Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 paket	7.300.000	
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		- Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	6.450.000		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		- Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	6.280.000	
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	129.080.000		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	99.000.000	
- Penyediaan		- Jumlah paket Peralatan				- Penyediaan		- Jumlah paket			

Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	8.131.000	Peralatan Rumah Tangga		Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	3.140.000
	-Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	201.062.000	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	139.362.000
	-Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	13 paket	40.000.000	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		-Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	13 paket	30.300.000
	- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	1 dokumen	12.000.000	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan		- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	1 dokumen	12.000.000
	- Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	20.695.000	- Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- Jumlah laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	13.870.000
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
						-jumlah		



- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	10.500.000	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	7.670.000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	125.884.000	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	140.184.000
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	742.383.000	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	744.163.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	-jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	37 unit	192.401.000	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	-jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	37 unit	165.570.000

	<p>Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>- Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>		<p>pajaknya</p> <p>-jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi</p> <p>-jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi</p>	<p>13 unit</p> <p>120 unit</p>	<p>105.320.000</p> <p>45.000.000</p>	<p>Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>- Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>- Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>		<p>-jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi</p> <p>-jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi</p>	<p>11 unit</p> <p>90 unit</p>	<p>78.000.000</p> <p>32.850.000</p>		
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN</b>					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						

<p><b>PUBLIK</b></p> <p><b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b></p> <p>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait</p> <p><b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat</b></p> <p>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan</p>		<p>-Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p>	<p>4 laporan</p>	<p>10.000.000</p>	<p><b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b></p> <p>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait</p> <p><b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat</b></p> <p>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan</p>		<p>-Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p>	<p>4 laporan</p>	<p>9.130.000</p>	
		<p>-Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</p>	<p>4 laporan</p>	<p>7.125.000</p>			<p>-Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</p>	<p>4 laporan</p>	<p>4.460.000</p>	

	Lain Yang Dilimpahkan										
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b> <b>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b> Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan <b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b> Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan pendidikan dan Ketrampilan		-Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  -Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan	4 lembaga  2400 keluarga	48.261.000  67.050.000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b> <b>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b> Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan <b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b> Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan	-Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  -Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	4 lembaga  1823 keluarga	24.720.000  57.350.000		

	untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing			sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing		berkualitas dan berdaya saing			
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b> <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		-Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 laporan	297.540.000	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b> <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		-Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 laporan	285.040.000	



**TABEL T-C.32**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025**  
**KECAMATAN PEKALONGAN UTARA**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1.	Peninggian dan Pengecoran Jalan Selat Karimata dan Drainase Udit 40 Jalan Selat Karimata (kanan kiri) lanjutan	RW 1 – 6 Kelurahan Bandengan	Presentase ketercapaian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1300 x 5 x0,4 m dan 2600 m x 0,3 m	PK 1 dalam musrenbang tingkat kecamatan
2.	Perbaiki dan normalisasi saluran Jalan progo Timur, Jl. Veteran dan Manunggal	Lintas RW 03, 04, 06	Presentase ketercapaian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	2500 m	PK 2 dalam musrenbang tingkat kecamatan
3.	Drainase Udit depan Mushola Suhada Jalan Kusuma Bangsa Sebelah Makam Pahlawan	RT.1,2 RW 01	Presentase ketercapaian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	600 m	PK 3 dalam musrenbang tingkat kecamatan
5.	Usulan Kegiatan pemberdayaan perempuan melalui perkuatan perempuan dalam kegiatan ekonomi	7 kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara	Presentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan melalui perkuatan perempuan dalam kegiatan ekonomi	50 orang x 7 kelurahan	PK 5 dalam musrenbang tingkat kecamatan

6.	Pembangunan pagar keliling kantor kelurahan Panjang Wetan beserta pintu gerbang	Kantor Kelurahan Panjang Wetan	Persentase ketercapaian gedung/ bangunan yang terbangun	1 unit	Usulan melalui surat kepada Ketua TAPD
7.	Pembangunan talud/penyangga pinggiran saluran air Kelurahan Panjang Wetan	depan makam Kristen RT.01 RW.06 Kelurahan Panjang Wetan	Persentase ketercapaian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Usulan melalui surat kepada Ketua TAPD
8.	Pembangunan Posyandu	Rt 04 RW 06 Kelurahan Panjang di area bantaran sungai lodji	Persentase ketercapaian pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Usulan melalui surat kepada Ketua TAPD
9.	Pembangunan gedung kantor Panjang Baru	Kelurahan Panjang Baru	Persentase ketercapaian gedung/ bangunan yang terbangun	1 unit dengan nilai 1.012.000.000	Usulan melalui surat kepada Ketua TAPD
10.	Pembangunan Perluasan Kantor Kelurahan Krapyak	Kelurahan Krapyak	Persentase ketercapaian gedung/ bangunan yang terbangun	1 unit dengan nilai 400.000.000	Usulan melalui surat kepada Ketua TAPD
11.	Pembangunan gedung logistic Kelurahan Padukuhan Kraton	Kelurahan Padukuhan Kraton	Persentase ketercapaian gedung/ bangunan yang	1 unit dengan nilai	Usulan melalui surat kepada Ketua



12.	Rehan lanjutan PAUD Manunggal	Padukuhan Kraton	terbangun  Persentase ketercapaian gedung/ bangunan yang terbangun	125.000.000  1 unit dengan nilai 100.000.000	TAPD
-----	-------------------------------	------------------	--	--	------

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional merupakan acuan utama bagi setiap daerah propinsi dan kabupaten / kota dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan daerah kota harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnya berupa pola dasar pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
2. Belum optimalnya mobil patroli untuk kegiatan rutin trantibum dalam melayani pemenuhan kebutuhan akan rasa aman dan ketertiban bagi warga di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.
3. Belum optimalnya mobil sampah untuk kegiatan rutin pengambilan sampah dikarenakan armada yang ada rusak berat karena sering kena banjir dan rob.
4. Belum optimalnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Permasalahan ini muncul sebagai akibat faktor eksternal berupa cepatnya perubahan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan penataan organisasi dan kelembagaan serta ketatalaksanaan pemerintahan. Dampak dari perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah membutuhkan proses penyatuan dengan situasi dan kondisi yang akhirnya menghambat laju kinerja aparatur.
5. Belum optimalnya profesionalisme aparat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dimana mengharuskan adanya aparat yang profesional dalam proses penerapan tata pemerintahan yang baik ( Good Governance ).
6. Kurangnya komunikasi dan kerjasama LPM dan BKM dalam kegiatan koordinasi, perencanaan dan evaluasi pembangunan serta kurang

tersedianya dana yang dibutuhkan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan sarana prasarana dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat, menyebabkan program dan hasil pembangunan belum optimal.

7. Belum adanya keseragaman penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh aparaturnya Kelurahan maupun di tingkat RW / RT sebagai akibat kurang memahami sistem administrasi kependudukan serta belum adanya buku-buku manual bagi RT dan RW yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Sehingga data kependudukan ditingkat RT / RW masih kurang tertib, hal tersebut mempengaruhi data pendukung guna terwujudnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kinerja aparaturnya Kelurahan perlu ditingkatkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum, hal tersebut terjadi sebagai akibat :
  - a. Kurang representatifnya lokasi kantor Kelurahan dikarenakan tuntutan perubahan zaman ( kondisi rusak, kurang luas dll )
  - b. Adanya Lurah yang berdomisili di luar wilayah kerjanya karena belum tersedia rumah dinas bagi Lurah. Hal ini mempengaruhi kinerja Lurah dalam pelayanan masyarakat, karena sering timbul permasalahan sewaktu-waktu, sehingga berakibat penyelesaian masalah kurang cepat.
  - c. Perlu peningkatan SDM aparaturnya di bidang perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan sesuai sasaran pada bidang tugas / fungsinya masing-masing.
9. Belum adanya anggaran untuk fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olah raga maupun fasilitasi kegiatan ormas, sehingga event-event di tingkat Kecamatan Pekalongan Utara yang dapat mendorong terciptanya iklim yang kondusif tidak dapat terselenggara, serta menyebabkan pemuda dan potensi keolahragaan kesulitan dalam menyalurkan / mengembangkan bakat dan minat untuk berprestasi maupun berapresiasi.
10. Kurangnya kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman, pengamalan ajaran agama serta kualitas iman dan taqwa kepada

Tuhan YME bagi aparaturnya Pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan secara rutin, maka dapat diindikasikan bahwa masih rendahnya kualitas pengamalan ajaran agama dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut dapat mendorong lahirnya etika dan moral yang tidak mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keberhasilan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dalam mewujudkan tugasnya dalam dipengaruhi oleh :

1. Dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai.
2. Makin terbukanya komunikasi antar Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dengan masyarakat.
3. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
4. Makin meningkatnya kepedulian Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dalam pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya kerjasama dengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Untuk optimalisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan Timur melaksanakan Visi dan Misi yang telah disusun oleh Kepala Daerah terpilih, Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Pekalongan adalah :

***“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berdasarkan nilai-nilai religiusitas”***

yang dijabarkan ke dalam Misi – Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan ;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat ;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan ;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan ;
5. Mengembangkan IT berbasis komunitas ;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah.

Tujuan yang telah dirumuskan Kecamatan Pekalongan Utara dalam mendukung visi dan misi Walikota Pekalongan dalam hal ini misi kedua adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Akan dicapai melalui 2 Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan guna terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta dengan melihat prioritas pembangunan yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Rencana Kerja tahun 2025 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2025. Pada prinsipnya program dan kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pekalongan Utara pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif awal sebesar Rp 9.753.690.000,-

Sehubungan dengan hal tersebut untuk Rencana Kerja Tahun 2025 dengan melihat renstra 2021-2026 sesuai analisis dari Bappeda, Kecamatan Pekalongan Utara melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas)) kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif awal sebesar Rp 9.753.690.000,-dengan rincian sebagai berikut :

1.1. Program

- 1.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 1.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 1.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 1.1.4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1.1.5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1.2. Kegiatan

- 1.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.2.1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2.1.2. Administrasi Keuangan Daerah
- 1.2.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1.2.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.2.1.5. Penyediaan Jasa Penujng Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.2.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.2.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - 1.2.2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - 1.2.2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
- 1.2.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - 1.2.3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan
  - 1.2.3.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- 1.2.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - 1.2.4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1.2.5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - 1.2.5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 1.3. Sub Kegiatan
  - 1.3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.3.1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - 1.3.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - 1.3.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

- 1.3.1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.3.1.2. Administrasi Keuangan Daerah
  - 1.3.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.3.1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
  - 1.3.1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.3.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1.3.1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.3.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.3.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.3.1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.3.1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 1.3.1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 1.3.1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.3.1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 1.3.1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.3.1.5. Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.3.1.5.1 Penyediaan Jasa surat menyurat
  - 1.3.1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.3.1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.3.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.3.1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan



Perorangan Dinas atau Kendaraan  
Dinas Jabatan

1.3.1.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung  
Kantor dan bangunan Lainnya

1.3.1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan  
Prasarana Gedung Kantor atau  
Bangunan Lainnya

1.3.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1.3.2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di  
Tingkat Kecamatan

1.3.2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan  
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan  
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal  
Terkait

1.3.2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan  
kepada Camat

1.3.2.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang  
Terkait dengan Kewenangan Lain yang  
Dilimpahkan

1.3.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1.3.3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat  
Kecamatan

1.3.3.2.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

1.3.3.2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat  
Kecamatan dan Kelurahan

1.3.3.2.1 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam  
Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan  
untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia  
yang Berkualitas dan Berdaya Saing

1.3.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.3.4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan  
Ketertiban Umum

1.3.4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

1.3.5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1.3.5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1.3.5.1.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025 dan Prakiraan Maju

Tahun 2026

Kota Pekalongan

Kode OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Baru	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Baru	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME CATATAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	Kecamatan Pekalongan Utara								
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Kecamatan Pekalongan Utara	100 %				100 %	
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Ketercapaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Pekalongan Utara	100 %				100 %	

7.01.02.2.01.00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4 laporan	9.130.000	APBD			10.000.000
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Ketercapaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kecamatan Pekalongan Utara	<b>100 %</b>					
7.01.02.2.04.00 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		4 laporan	4.460.000	APBD			5.137.700
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	Kecamatan Pekalongan Utara	<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Pekalongan Utara	<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	
7.01.03.2.03.00 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		4 lkk	24.720.000	APBD			19.600.000

7.01.03.2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	Kecamatan Pekalongan Utara	100 %					
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1823 keluarga	57.350.000	APBD			43.241.000
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Kecamatan Pekalongan Utara	100 %				100 %	
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase ketercapaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Pekalongan Utara	100 %				100 %	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		11 laporan	285.040.000	APBD			258.977.000

7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara</b>	Kecamatan Pekalongan Utara	100 %				100 %	
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Pekalongan Utara	100 %				100 %	
7.01.05.2.01.00 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 dokumen	4.970.000	APBD			6.256.000
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	- Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja - Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Persentase Pengadaan/Pemeliha raan Barang Milik Daerah	Kecamatan Pekalongan Utara	100 %  100 %  100 %				100 %  100 %  100 %	
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Pekalongan Utara	100 %				100 %	

7.01.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dokumen	4.089.000	APBD			5.000.000
7.01.01.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 dokumen	1.927.000	APBD			3.000.000
7.01.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 laporan	108.570.000	APBD			116.000.000
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Pekalongan Utara	<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	
7.01.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		71 orang	7.590.684.000	APBD			7.609.263.000
7.01.01.2.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 laporan	195.900.000	APBD			198.000.000
7.01.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	1.786.000	APBD			3.000.000
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Pekalongan Utara	<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	

7.01.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		2 paket	7.300.000	APBD			16.500.000
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Pekalongan Utara	<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	
7.01.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 paket	6.280.000	APBD			8.600.000
7.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4 paket	99.000.000	APBD			152.000.000
7.01.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4 paket	3.140.000	APBD			12.750.000
7.01.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 paket	139.362.000	APBD			195.000.000
7.01.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		13 paket	30.300.000	APBD			40.250.000
7.01.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 dokumen	12.000.000	APBD			20.000.000
7.01.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	13.870.000	APBD			12.540.000



<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Pekalongan Utara	<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	
7.01.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 laporan	7.670.000	APBD			10.500.000
7.01.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	140.184.000	APBD			125.884.000
X.XX.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	744.163.000	APBD			576.096.000
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Pekalongan Utara	<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	
7.01.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		37 unit	165.570.000	APBD			115.978.000
7.01.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		11 unit	78.000.000	APBD			78.500.000

7.01.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		90 unit	32.850.000	APBD			45.000.000
-----------------------	--	--	--	---------	------------	------	--	--	------------

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1 Rencana Kerja**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka disusunlah rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024 menetapkan 5 (lima) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan.

##### Program Yang Dilaksanakan

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

##### Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
9. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
10. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan Yang Dilaksanakan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Keuangan SKPD
7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
21. Pelaksanaan Urusan Permerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
22. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
23. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

24. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing
25. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
26. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

#### **4.2 Pendanaan**

Dalam menjalankan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas, Kecamatan Pekalongan Utara memperoleh pendanaan kegiatan yang bersumber dari APBD dan DAU APBN terkait gaji dan tunjangan PNS.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis Good Governace dan Clean Government dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) mengikuti paradigma baru yang akan mampu menciptakan kebijakan (trickle down effect) sehingga kepentingan masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan selain menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 juga berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Renja diharapkan juga mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan suatu keputusan kebijakan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pemangku jabatan dan staf Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih optimal.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal yang perlu diperhatikan selama tahun berjalan guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Demikian Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025 ini kami sajikan sebagai bentuk acuan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang, sehingga tercapai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan yang lebih baik dengan prinsip bersama-sama melaksanakan pembangunan dengan asas transparansi, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan bersama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara serta sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Kota Pekalongan.

Semoga Renja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga

diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2025.

Demikian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pekalongan, 08 Agustus 2024  
CAMAT PEKALONGAN UTARA  
KOTA PEKALONGAN

